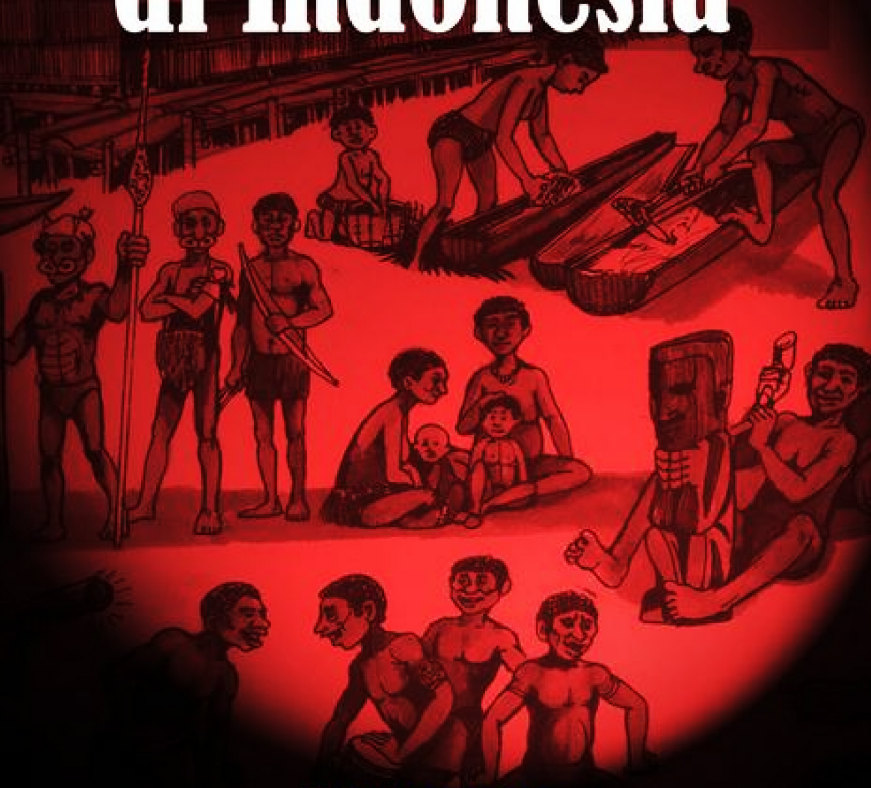


Dr. Zulyani Hidayah

ENSIKLOPEDI

Suku Bangsa di Indonesia



Kata Pengantar:

Dr. J. Emmed M. Prioharyono, MA, M.Sc

Zulyani Hidayah

Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2015

Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia /Zulyani Hidayah; kata pengantar
J. Emmed M. Prioharyono; ed.2-Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
2015

xxii + 470 hlm; 15 x 23 cm
ISBN: 978-979-461-929-2

Judul:
Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia
Copyright © 2015, Zulyani Hidayah

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights reserved

Diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Anggota IKAPI DKI Jakarta

Edisi pertama: Juli 1997 (PT Pustaka LP3ES)
Edisi kedua: April 2015
YOI: 822.33.6.2015
Gambar sampul: Zulyani Hidayah
Desain sampul : Rahmatika

Alamat penerbit:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10 Jakarta 10230
Telepon: (021) 31926978; 3920114
Faks: (021) 31924488
e-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
[http: www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar oleh Dr. J. Emmed M. Prioharyono	vii
Prakata	ix
Pendahuluan	xv
Petunjuk Penggunaan Entri, Nomor, dan Peta	xxii
 Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia	 1
 Daftar Pustaka	 431
Lampiran: Peta-peta Daerah Suku Bangsa di Indonesia	443
Indeks	455
Tentang Penulis	469

KATA PENGANTAR

Keanekaragaman suku bangsa yang menjadi komponen-komponen masyarakat Indonesia merupakan sebuah aset budaya bangsa yang tidak ada duanya di bangsa manapun di dunia. Ratusan suku bangsa ini mendiami ribuan Pulau Nusantara, dari Sabang hingga Merauke, di sepanjang garis Katulistiwa, dari Pulau Mangas hingga Pulau Rote di sepanjang garis bujur Utara ke Selatan. Kemajemukan masyarakat Indonesia itu tentunya berdampak pada kemajemukan budaya yang dimiliki oleh ratusan suku bangsa ini. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang tepat sebagai landasan pemersatu bangsa Indonesia. Pemahaman dan informasi mengenai kebudayaan suku bangsa-suku bangsa yang berbeda-beda ini merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia untuk meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan budaya itu sebagai masyarakat Indonesia yang multikultural. Dalam sebuah masyarakat yang majemuk, paham multikulturalisme penting dimiliki untuk menghindari praktik-praktik diskriminasi yang dapat menghalangi terwujudnya integrasi nasional. Kajian-kajian disiplin ilmu antropologi yang menghasilkan karya-karya etnografi suku bangsa-suku bangsa di Indonesia selama ini belum dapat memberikan informasi lengkap mengenai keanekaragaman kebudayaan dari ratusan suku bangsa di negara kita. *Ensiklopedi Suku bangsa di Indonesia* karya almarhum Dr. Zulyani Hidayah memberikan informasi rinci mengenai tradisi, adat istiadat, pranata kekerabatan dan budaya material (*tangible culture*), serta berbagai aspek budaya dari suku bangsa-suku bangsa di Indonesia yang ditulis secara menarik dan jelas. Ilustrasi-ilustrasi yang dibuat sendiri oleh penulisnya sekaligus menjelaskan dan memikat.

Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 oleh Pustaka LP3ES, Jakarta. Kini, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia menerbitkannya kembali dengan revisi-revisi yang dibuat oleh Dr. Zulyani Hidayah sebelum ia meninggal dunia pada awal tahun 2014. Akhir kata, saya berharap buku ini dapat memberikan sumbangan bermanfaat mengenai kebudayaan suku bangsa-suku bangsa di Indonesia, sehingga pemahaman multikulturalisme—yang patut dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia—dapat berkembang dan memperkokoh integrasi bangsa dalam rajutan NKRI.

Depok, 12 September 2014

Dr. J. Emmed M. Prioharyono, MA, M. Sc

PRAKATA

Kemajemukan yang Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia

Orang Indonesia dapat mengatakan dengan bangga bahwa negara ini adalah Negara yang majemuk (plural). Namun bagaimana bentuk kemajemukan itu hampir tidak ada yang bisa menyatakan, menceritakan, mendeskripsikan, atau menjelaskan bagaimana adanya. Kalau dikatakan kemajemukan bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, beragam tapi satu dalam kebangsaan, satu dalam kenegaraan, satu dalam kenasionalisme, satu dalam bahasa. Lebih jauh lagi jika dikaji berdasarkan asal-usul faal, fisik manusia Indonesia. Jika dikaji melalui identitas ras, warna kulit, warna, bentuk rambut dan kornea mata, tinggi tubuh dan tulang hidung, tulang pipi, dan tulang tengkorak manusia Indonesia sekarang, nampaklah bahwa manusia Indonesia adalah perpaduan seluruh ras di dunia.

Secara budaya, secara akal pikiran atau pemikiran kebhinneka-tunggal-ikaan hal itu tertera secara nyata bahwa itulah ideologi bangsa Indonesia. Hal ini tergambar secara nyata melalui keterwakilan pemikiran tokoh pemikir-pemikir dunia dan para pemikir agama-agama resmi dunia, seperti diwarisi oleh para tokoh agama yang ada di Indonesia.

Hampir semua ilmu sosial dan budaya yang menjelaskan kehidupan manusia dan budaya, telah berkembang cukup lama di Indonesia. Ilmu antropologi yang dikembangkan oleh para ahli dari kalangan bangsa Indonesia sendiri paling tidak telah tumbuh kembang sejak 35 tahun **yang** lalu. Namun nampaknya belum melahirkan satu pun literatur tentang kebudayaan Indonesia. Lembaga Human Relations Area Files (HRAF) di

Yale University, yang memiliki data tentang manusia dan budayanya dari seantero dunia paling banyak hanya mencatat sepertiga dari seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Sedangkan usaha pencatatan budaya suku bangsa yang dilakukan oleh R. Kennedy (1950) belum menggambarkan keseluruhan bangsa Indonesia masa kini. Bahkan juga belum setelah pekerjaan itu dilanjutkan oleh F.M. Lebar (1972).

Sementara itu Bapak Antropologi Indonesia, Koentjaraningrat (1969) memperkenalkan keberagaman suku bangsa di Indonesia dan di seluruh dunia dengan buku *Atlas Etnografi Sedunia*, yang diterbitkan pada awal tahun 1960-an. Sayangnya buku ini masih terlalu sederhana untuk memuaskan keingintahuan kita tentang kemajemukan masyarakat dan kekhasan budaya yang ada di Indonesia. Tapi tanpa kenal lelah Koentjaraningrat terus menulis, menyunting, dan akhirnya menerbitkan pula sebuah buku deskripsi umum mengenai beberapa suku bangsa di Indonesia, dengan judul *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (1971). Dengan buku itu barulah kemajemukan dan kekhasan budaya-budaya di Indonesia menjadi lebih terang.

Pengetahuan kita tentang masyarakat dan budaya Indonesia dibuat gamblang oleh adanya batasan penerapan administrasi modern di semua daerah di Indonesia. Batasan administrasi itu bukan hanya menekankan keseragaman kedaerahan, tapi juga mendukung upaya-upaya *sponsorship* penonjolan budaya khas masing-masing.

Alamnya sendiri merupakan kepulauan yang terletak di daerah tropis. Terbentang di garis khatulistiwa, yang hanya dikenai dua musim: musim hujan dan musim kemarau. Dua musim itu sajalah yang menggarap perilaku fisik dan perilaku budaya manusia dan seisi alam Indonesia. Sekaligus juga membatasi produk budaya dan distribusi budaya manusia Indonesia. Termasuk dalam periode terjajah dan periode bebas merdeka seperti sekarang. Bagi dunia ilmu pengetahuan, majemukan yang ada di Indonesia itu merupakan objek penelitian yang tak terkira luasnya.

Bangsa Indonesia memiliki mulai dari paroh bangsa yang masih hidup bersahaja namun eksotis karena memiliki ragam budaya yang khas di mata bangsa-bangsa maju, sampai kepada paroh-paroh bangsa yang tergolong hipermetropolitan, karena selalu memilih kota-kota

metropolitan sebagai tempat tinggal. Karena kemajemukan dan keberagaman masyarakat Indonesia itu, cocok sekali menjadi objek penelitian ahli ilmu bangsa-bangsa. Sementara itu masih ada pula paroh bangsa-bangsa yang sedang gencar menyerap dan menghadang pengaruh budaya luar yang bisa membantu dan memacu mereka menuju kemajuan. Bukan hanya menyamai kemajuan bangsa-bangsa yang sudah lebih dulu maju, bahkan melampaui tingkat kemajuan yang sudah lebih dulu dicapai bangsa-bangsa lain.

Paroh-paroh bangsa Indonesia itu bukan hanya tergolong masyarakat pedesaan dan perkotaan di pusaran aktivitas elite, marginal, dan terisolirkan karena berbagai kelas dan kategori baru yang diciptakan oleh manusia Indonesia modern itu sendiri. Sehingga tetap mempertahankan keragaman objek kajian ilmu sosiologi dan antropologi di Indonesia dan dunia. Termasuk objek kajian ilmu-ilmu sosial lainnya.

Paroh-paroh bangsa atau masyarakat-masyarakat perkauman yang demikian banyak jumlahnya di Indonesia itu biasa disebut “suku bangsa” atau “kelompok etnik”, terjemahan bebas dari bahasa Inggris “ethnic group” yang berarti paroh-paroh, atau bagian-bagian dari sebuah bangsa yang masing-masing memiliki budaya yang khas. Kata suku sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti paroh atau bagian, bangsa juga berasal dari bahasa Melayu yang berarti orang-orang yang menjadi penduduk sebuah negeri. Di masa kini sebuah suku bangsa harus diartikan sebagai sebuah bagian atau paroh dari bangsa yang memiliki budaya sendiri yang khas.

Di masa kini ratusan suku bangsa yang menjadi penduduk Indonesia tersebut dibuat gamblang mengenalinya dengan adanya batasan administratif yang lebih menekankan keseragaman “kedaerahan”. Sehingga masyarakat dan budaya di Provinsi Aceh, misalnya, selalu muncul sebagai bauran budaya masyarakat asli lokal di Provinsi Aceh. Tidak berarti muncul sebagai wakil dari masyarakat dominan di Provinsi Aceh. Padahal sesungguhnya di provinsi itu berdiam sejumlah masyarakat suku bangsa yang memiliki bahasa dan budaya sendiri, seperti suku bangsa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamek, Simeuleu, Kluet, dan suku bangsa minoritas terisolir yang disebut Gumbak Cadek.

Provinsi Sumatra Selatan sebagai contoh yang lain, bukan hanya dihuni oleh orang Palembang tapi juga dihuni oleh lebih dari 30 suku bangsa yang masing-masing memiliki bahasa dan budaya sendiri-sendiri. Provinsi Jawa Timur, sebagai contoh lain, tidak seluruhnya dihuni oleh suku bangsa Jawa, tetapi juga didiami oleh suku bangsa Madura, Tengger, dan Osing. Keberagaman makin lebih beraneka lagi dengan pembauran dan amalgamasi setelah adanya kebebasan menetap dan bertempat tinggal bagi seluruh populasi di mana saja di wilayah Indonesia. Dan alangkah bertambah banyak dan beraneka ragamnya pembauran di Indonesia apabila Timor Timur tetap menjadi bagian Negara Indonesia. Pada terbitan pertama, ensiklopedi ini sendiri masih memuat masyarakat suku-suku bangsa di Provinsi Timor Timur.

Konsep Suku bangsa di Indonesia

Istilah suku bangsa atau kelompok etnik, menurut penulis dapat saling mengganti, karena konsep dasarnya sama saja. Di ensiklopedi berbahasa Indonesia ini istilah suku bangsa lebih tepat dipakai dalam rangka melihat bangsa Indonesia dari sudut pandang proses sejarah pembangsaan yang melatarbelakangi Negara dan budaya Indonesia. Sedangkan istilah kelompok etnik nampaknya lebih populer di kalangan akademik, mungkin karena sering dikomunikasikan antar akademikus dunia. Di Indonesia sendiri istilah ini mulai banyak digunakan sejak tahun 1960-an, terutama untuk melengkapi istilah “suku” yang kontroversial. Karena di satu pihak sudah lazim digunakan untuk kata ganti “klan atau klen” (*clan*) di masyarakat Minangkabau. Dengan dilengkapi istilah suku bangsa, terasa maknanya lebih meningkat daripada sekedar kata ganti keluarga luas. Tapi lebih bermakna untuk menyebut kesatuan hidup yang memiliki identitas serta unsur-unsur sosial dan budaya yang khas.

Istilah suku bangsa ini menjadi lebih penting artinya untuk mengganti ruang kosong yang ditinggalkan oleh kesatuan-kesatuan hidup yang semula dikenal sebagai “bangsa”. Ketika Bangsa Indonesia meraih status merdeka dan menyatukan diri ke dalam satu tanah air yang terdiri dari memiliki ribuan pulau, ratusan hektar laut, sungai, selat dan danau; satu bangsa yang memiliki negara, pemerintah yang berdaulat, bercita-

cita, dan berfilsafat kebangsaan sendiri; satu bahasa resmi yang dapat dipakai untuk mengkomunikasikan pemikiran dan suara hati, maka bangsa-bangsa yang semula berdiri sendiri-sendiri itu mengikrarkan diri menjadi bagian-bagian dari atau sebagai paroh-paroh bangsa Indonesia. Dengan demikian posisi posisi “bangsa” yang semula dimiliki oleh orang Aceh, Batak, Jawa, Sunda, Bali, Bugis, Ambon dan berbagai macam nama kesatuan hidup lain, meleburkan diri ke dalam kesatuan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika! Di dalam negara bangsa Indonesia.

Pembentukan Negara dan bangsa Indonesia tidak mengakibatkan suku bangsa-suku bangsa itu menjadi punah dan tenggelam, karena masing-masing tetap mempertahankan identitas dan kekhasan budaya tradisionalnya. Bahkan, dalam rangka interaksi mereka dalam kesatuan hidup yang lebih luas. Sejak *founding father* berjuang membentuk, membangun dan menempa bangsa Indonesia, sejak awal sudah menyadari bahwa bangsa yang sedang dipandu untuk lahir dan tumbuh besar ini adalah bangsa besar yang majemuk, bangsa yang “Bhinneka Tunggal Ika”, beraneka ragam tapi tetap tumbuh dalam satu kesatuan identitas.

Fredrick Barth berpendapat bahwa suku bangsa atau kelompok etnik harus dilihat sebagai suatu organisasi sosial, karena dengan demikian ciri-ciri terpening dari sebuah kelompok etnik akan tampak, yaitu karakteristik dari “pengakuan oleh diri dan pengakuan oleh orang lain”. Maka yang kita perlukan sekarang adalah pemahaman tentang bagaimana prosedur “pengakuan” tersebut berlaku dalam hubungan antarkelompok etnik dalam konteks kehidupan suatu bangsa majemuk seperti Indonesia.

Dalam rangka penulisan ensiklopedi suku bangsa di Indonesia ini perlu kiranya ditemukan kunci dari perwujudan “pengakuan” tersebut. Menurut penulis konsep kesukubangsaan orang Indonesia muncul seiring dengan terbentuknya masyarakat Indonesia *vice versa* bangsa Indonesia dengan segala variasi dan keekaragaman masyarakatnya.

Dr. Zulyani Hidayah

PENDAHULUAN

Peta Suku bangsa di Indonesia

Sebuah peta adalah penggambaran sederhana dari suatu ruang (*a simplified depiction of a space*), yaitu suatu bantuan navigasional yang menyorot hubungan antara objek-objek dalam ruang tertentu. Kebanyakan peta yang kita kenal merupakan penggambaran dua dimensi atau penggambaran akurat secara geometris dari sebuah ruang tiga dimensi. Ilmu dan seni pembuatan peta disebut kartografi.

Suatu suku bangsa adalah paroh atau bagian dari suatu bangsa yang di zaman modern ini direpresentasikan oleh sebuah negara-bangsa. Sebelum tergabung ke dalam sebuah negara-bangsa, ketika kesatuan hidup itu masih hidup sendiri-sendiri, masing-masing dapat disebut sebagai suatu “bangsa” sendiri. Sebuah suku bangsa dianggap ada jika ada pengakuan dari warga suku bangsa itu sendiri, dan pengakuan dari suku bangsa-suku bangsa lain di sekitarnya. Pengakuan itu sendiri dapat terjadi karena ada ciri-ciri menonjol yang saling membedakan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain. Ciri yang paling menonjol, memiliki perbedaan yang jelas, dengan ciri suku bangsa lain, biasanya adalah bahasa dan adat-istiadat, serta corak budaya tertentu yang sering dijadikan sebagai simbol jati diri oleh suku bangsa tersebut.

Pada masa kini ada kecenderungan sebagian orang untuk menggunakan istilah “masyarakat adat” untuk menyebut seluruhnya atau sebagian kelompok suku bangsa. Walaupun masalah adat tidak hanya menyangkut hak komunal atas tanah, tetapi istilah masyarakat adat sendiri mulai muncul ketika permasalahan hak ulayat versus tanah

negara mencuat. Masyarakat yang dirugikan memperjuangkan hak-hak mereka melalui kisi-kisi UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang “agak” memberi kelonggaran bagi Hak Adat.

Sebuah peta suku bangsa mestilah berupa suatu perpaduan antara informasi tentang keberadaan suku bangsa (kelompok etnis atau *ethnic group*) yang ada di Indonesia dengan informasi tentang “ruang” mereka secara geografis. Ruang geografis suatu suku bangsa yang paling umum direpresentasikan adalah daerah asal atau wilayah pemukiman komunitas adat mereka yang dapat digambarkan secara kartografis dua dimensi. Daerah asal atau wilayah pemukiman komunitas adat tersebut biasanya hanya dapat diketahui melalui tradisi lisan atau melalui catatan-catatan etnografi yang memuat tentang hal tersebut.

Sesuai dengan perkembangan Iptek, penggambaran “ruang” kesukubangsaan dua dimensi secara kartografis juga tidak lagi sederhana, tetapi juga dapat seolah-olah tiga dimensi melalui teknik *multilayer* dan *multiwindows* dengan bantuan komputer. Efek tiga dimensi tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan informasi-informasi pendukung ciri-ciri khas suku bangsa yang bersangkutan. Karena itu, pendekatan yang umum dipakai untuk menggambarkan kedua pokok informasi itu seharusnya adalah pendekatan geografi budaya. Melalui pendekatan ini, keberadaan dan wilayah pemukiman tradisional suatu komunitas suku bangsa digambarkan bersama dengan ciri-ciri khas kebudayaan (etnografika) mereka dengan bantuan teknik gambar kartografi terkomputerisasi.

Banyak pihak menyadari bahwa kemajemukan masyarakat dan kebudayaan Indonesia perlu digambarkan secara sederhana dalam bentuk gambaran kartografis kesukubangsaan. Karena itu upaya untuk membuat peta persebaran atau peta lokasi daerah asal atau wilayah pemukiman tradisional suku bangsa-suku bangsa di Indonesia bukan lagi hal baru. Peta suku bangsa pertama dibuat oleh Koentjaraningrat (1965) dengan menambahkan lembar Indonesia dalam “Atlas Etnografi Dunia” hasil proyek Human Relation Area File (HRAF) dari Yale University. Namun

sifatnya masih terlalu kasar dan hanya menyebut suku bangsa-suku bangsa yang sudah umum dikenal.

Proyek pemetaan suku bangsa yang agak rumit pernah coba dibuat oleh Dirjen Kebudayaan pada tahun 1985-1987. Disebut agak rumit karena coba menggambarkan persebaran populasi setiap suku bangsa sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Proyek tersebut terhenti begitu saja, bukan saja karena kekurangan dana, tapi juga karena tidak memiliki sistem pengolahan dan penyajian data sesuai dengan kompleksitas data yang masuk. Sebenarnya prospek proyek itu memiliki kemungkinan untuk jadi cukup besar, karena waktu itu Dirjen Kebudayaan memiliki tenaga penilik kebudayaan (selain penilik sekolah) di tingkat kecamatan. Kegagalan terjadi lebih banyak karena tidak memiliki dasar konsep yang kuat dan manajemen pelaksanaan studi tersendiri. Untuk proyek besar seperti pemetaan suku bangsa diperlukan sebuah badan pelaksana dengan sejumlah tenaga ahli dari bidang antropologi dan geografi budaya.

Peta suku bangsa yang lebih mewakili keberadaan suku bangsa-suku bangsa di Indonesia berdasarkan daerah asal atau pemukiman tradisional baru ada pada tahun 1997, ketika Zulyani Hidayah membuatnya sebagai pelengkap *Ensiklopedi Suku bangsa di Indonesia* (LP3ES, 1997). Peta wilayah “adat” suku bangsa tersebut dimungkinkan untuk digambarkan karena ada data tentang wilayah “administrasi” sejumlah besar suku bangsa dari berbagai referensi, seperti data etnografis, laporan hasil riset lapangan, dan laporan pelaksanaan proyek Pemukiman Masyarakat Terasing oleh Depsos. Pada peta berskala besar itu nama-nama suku bangsa tidak ditulis secara penuh, tetapi diganti dengan nomor kode sebanyak tiga digit, sehingga pembaca harus mencocokkan nama dengan nomor kode untuk dapat mengetahui di mana suku bangsa tertentu bermukim. Kelemahannya, tentu saja pembaca tidak dapat dengan segera menemukan lokasi suatu suku di peta, karena harus lebih dulu mencocokkan nama dengan simbol namanya (angka tiga digit).

Proyek penyusunan peta suku bangsa juga pernah ada di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 1999, Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2000, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003. Akan tetapi, nampaknya belum ada hasil yang dapat dipublikasikan kepada publik, mungkin karena masih menyimpan sejumlah kendala.

Sebagai negara yang luas, dengan masyarakat yang majemuk, kebutuhan akan data dan informasi tentang kemajemukan tersebut sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat dan kebudayaan, tetapi juga untuk pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih berkeadilan, berjiwa solidaritas, demokratis, dan terintegrasi. Peta daerah “asal” suku bangsa dapat membantu pemahaman umum tentang kemajemukan itu sebagai sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinamis. Terutama untuk menggambarkan kelompok masyarakat yang masih memiliki sistem kehidupan sosial budaya sendiri-sendiri (khas atau tradisional) dibandingkan dengan pemahaman tentang kehidupan masyarakat secara umum yang cenderung bersifat linear, kaku, dan seolah-olah seragam, sama saja antara satu dengan yang lain. Karena itu penggambaran keberadaan suku bangsa-suku bangsa dan daerah “asal” atau wilayah “adat” (tradisional) mereka adalah bagian dari kesadaran tentang perbedaan-perbedaan dalam satu persamaan (*bhinneka tunggal ika*).

Penggambaran kemajemukan masyarakat dan kebudayaan Indonesia melalui peta suku bangsa seharusnya berada di bawah payung paradigma “integrasi kebudayaan”, yaitu pandangan bahwa masyarakat sebuah negara adalah satu pemilik sebuah kebudayaan besar yang terbentuk dari pluralitas corak-corak kebudayaan suku-suku (bagian atau paroh) bangsa yang membentuknya. Peta suku bangsa dengan paradigma integrasi kebudayaan ini akan dapat menahan tekanan globalisasi yang menimbulkan erosi nasionalisme.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka peta suku bangsa yang diperlukan bangsa Indonesia untuk masa kini dan masa depan adalah penggambaran keberagaman masyarakat dan kebudayaan dengan data-data virtual yang bersifat *recursive* (sambung-menyambung), holistik (menyeluruh) dan integratif (saling terkait), dengan bantuan program

khusus kartografis yang sudah banyak digunakan pada komputer PC. Penggambaran virtualistis tersebut untuk masa kini dimungkinkan berkat kemajuan teknologi olah data dan penyajian visual secara digital. Sistem pemetaan terkomputerisasi ini menggabungkan sekaligus data etnografis, geografis, demografis, dan administratif (kewilayahan) setiap suku bangsa.

Masalah

Masalah paling pokok dalam setiap studi dan pembuatan peta suku bangsa adalah penggambaran keberadaan suatu suku bangsa dan ciri khas kebudayaannya yang dapat mendukung keberadaan tersebut sebagai suatu kehidupan yang dinamis. Peta tersebut bukan saja menggambarkan keberadaan komunitas-komunitas yang dipetakan, tapi juga dinamika kehidupan mereka; baik dinamika yang timbul karena perubahan kebudayaan, maupun dinamika yang timbul karena perpindahan dan persebaran populasinya.

Peta sendiri sebagai sebuah teknik penggambaran objek dan lokasinya di lingkungan tertentu, memang bersifat temporer, dalam arti dibuat dalam konteks wilayah fisik-geografis dan periode waktu tertentu. Sebuah peta modern harus disertai dengan judul kredit (*credit tittle*) tentang pembuat, penerbit, tahun pembuatannya, kategori atau topik dari peta itu sendiri, dan makna dari ikon virtual (simbol-simbol) yang digunakan untuk menunjukkan keterkaitan sesuatu dengan lokasi tertentu atau legenda (*legend*).

Sedangkan pemetaan suku bangsa seharusnya dilihat sebagai sebuah teknik penggambaran keberadaan suku bangsa-suku bangsa dan lokasinya dalam konteks waktu, kepentingan, dan topik, didukung dengan data dan informasi etnografis sebagai penguat (*justified*) yang disampaikan lewat ikon-ikon virtual yang mudah dimengerti publik.

Namun, kritik utama terhadap mazhab geografi budaya sama seperti kekakuan yang dilakukan oleh kajian-kajian etnografi lama, yaitu pendekatannya yang dipandang terlalu bersifat “fotografis” (*still photographic*). Di mana penggambaran tentang masyarakat dan

kebudayaannya dibuat secara statis. Objek digambarkan sebagai sesuatu yang sudah mapan, gerak kehidupan sosial budaya masyarakat sasaran seakan ada seperti apa adanya saat etnograf datang merekam mereka. Pembaca atau audiens seakan berhadapan dengan suatu masyarakat dan kebudayaan demikian selama-lamanya. Jika penggambaran suatu masyarakat dilakukan pada periode X, maka setelah beberapa dekade gambaran tentang masyarakat tersebut dalam persepsi pembaca atau audiens masih tetap dalam kondisi X.

Sementara itu, di masa kini, pendekatan yang dianggap lebih sesuai untuk suatu studi ataupun demonstrasi hasil pemetaan suku bangsa adalah ekologi manusia (*human ecology*). Pendekatan ini merupakan perkembangan lanjut dari mazhab “wilayah budaya” (*culture area*), dengan ciri-ciri penjelasan lebih mendalam tentang keterkaitan kebudayaan suatu komunitas dengan lingkungan alam mereka dengan menyertakan dimensi perubahan (*cultural change*) dan waktu (*period*) secara kontekstual di dalam studinya.

Kelemahan Mendasar Peta Suku bangsa

Kelemahan pertama sebuah peta etnografi adalah keabsahan dan eksistensi suku bangsa itu sendiri. Khususnya terkait dengan ciri-ciri *ethnic identity* dan pengakuan diri dan pengakuan suku bangsa lain atas keberadaan suku bangsa tersebut. Kelemahan kedua, adalah tidak mungkin menggambarkan secara kartografis “kemajemukan” suku bangsa dan kesumiran kebudayaan suku bangsa-suku bangsa itu sendiri.

Pada masa kini suku bangsa-suku bangsa tidak lagi hanya berdiam di wilayah adat mereka, tetapi telah berbaur dengan berbagai suku bangsa lain. Sama sulitnya dengan menggambarkan secara kartografis persebaran masyarakat menurut kesukubangsaan di sebuah kota. Di DKI Jakarta misalnya, orang Betawi diakui sebagai masyarakat adat setempat jauh sebelum menjadi ibukota RI. Akan tetapi pada masa kini, pola pemukiman mereka tidak lagi mengikuti pola menetap lima puluh tahun yang lalu. Pemukiman mereka selain telah berbaur dengan

berbagai suku bangsa lain, juga banyak yang telah berpindah ke daerah lain yang selama ini tidak dianggap sebagai wilayah Betawi.

Batas-batas wilayah adat atau pemukiman yang dianggap milik masyarakat adat tertentu semakin kabur karena perpindahan tangan. Penguasaan suatu wilayah sebagai tanah adat oleh suatu suku bangsa atau masyarakat adat sendiri juga tidak benar-benar membagi habis suatu wilayah geografis. Biasanya mereka hanya menguasai (*claimed*) daerah-daerah yang memberi kehidupan secara langsung kepada masyarakatnya. Tanah-tanah tak bertuan di luar Hak Ulayat masyarakat adat itu pada masa sekarang telah dinyatakan sebagai Tanah Negara.

Sebuah peta suku bangsa sebaiknya tidak mengabaikan kemungkinan keberfungsian suatu wilayah geografis di luar penguasaan ada suatu suku bangsa atau masyarakat adat. Seperti kita ketahui, pada masa kini jutaan hektar tanah-tanah adat telah dimiliki oleh perusahaan besar untuk perkebunan, pertambangan, *real estate*, objek wisata. Belum lagi yang telah dialihkan oleh negara menjadi Taman Nasional atau Hutan Konservasi (Suaka Alam, Suaka Margasatwa). Sebagian lagi telah dimiliki oleh masyarakat pendatang transmigrasi dan pendatang spontan. Jadi, membagi habis suatu geografi administrasi untuk menggambarkan wilayah suatu suku bangsa akan berbenturan dengan banyak kepentingan lain, seperti dengan pengakuan hukum atas hak atas tanah dan pengakuan Hak Ulayat oleh masyarakat adat.

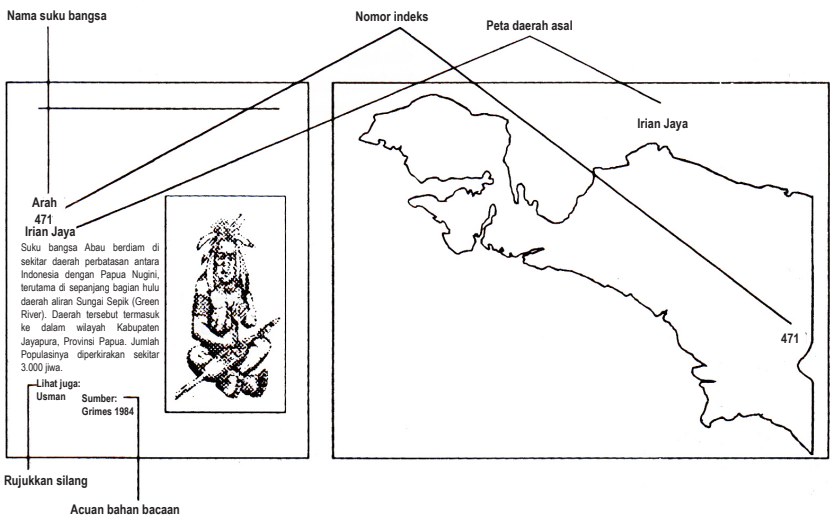
Jakarta, 4 Mei 2006
Dr. Zulyani Hidayah

Petunjuk Penggunaan Entri, Nomor, dan Peta

Susunan nama-nama suku bangsa yang termuat dalam ensiklopedi ini diatur secara alfabetis untuk memudahkan pencariannya. Untuk mencari persebarannya, dapat diikuti petunjuk Indeks Suku Bangsa yang dilengkapi dengan nama lain (jika ada), nomor kode entri dan peta lokasinya. Nomor-nomor entri tersebut akan memudahkan pembaca mencari kira-kira di daerah mana suku bangsa tertentu berdiam.

Peta lokasinya digambar sebanyak tujuh buah, yaitu Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya.

Contoh cara mencari lokasi suku bangsa:



A

ABAU

471

Papua

Suku bangsa Abau berdiam di sekitar daerah perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Terutama di sepanjang daerah aliran Sungai Sepik (Green River) bagian hulu. Daerah tersebut termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Jumlah populasinya diperkirakan sekitar 3.000 jiwa

Sumber: Grimes 1984.

ABUI (Barue, Barawahing, Namatalaki)

411

Nusa Tenggara

Suku bangsa Abui tersebar di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Alor. Antara lain di Kecamatan Alor Selatan, Alor Timur dan Alor Barat Laut. Wilayah ini terletak di Pulau Alor, dalam deretan pulau-pulau di Provinsi Nusa Tenggara

Timur. Bahasa Abui terbagi ke dalam beberapa dialek, seperti dialek Abui, Makadai, Kaluiwa, dan Laral. Dalam beberapa bahan bacaan disebut juga dengan nama lain, yaitu: Barue, Barawahing, Namatalaki.

Sumber: Koentjaraningrat 1969; Grimes 1984.

ABUNG (Abung Bunga Mayang)

061

Sumatra

Suku bangsa ini sering juga disebut dengan nama **Abung Bunga Mayang**. Jumlah populasinya sekitar 30.000 jiwa. Mereka berdiam di sekitar Kecamatan Kayu Agung dan Kecamatan Mesuji dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatra Selatan. Sebagian lain berdiam di wilayah Provinsi Lampung, yaitu di sekitar Sungai Tulang Bawang dan Danau Ranau.

Bahasa Abung termasuk ke dalam rumpun bahasa Melayu dengan dialek sendiri. Funke (e.f. Lebar 1964) meng-

golongkan masyarakat ini sebagai bagian dari suku bangsa Lampung, di mana mereka dipandang sebagai kelompok beradat Abung. Funke beranggapan bahwa orang Lampung, Abung, Peminggir, dan Pubian, pada awalnya sama-sama berasal dari Pegunungan Bukit Barisan sebelah barat. Lebih awal lagi mungkin berasal dari Minangkabau. Orang Abung sendiri beranggapan bahwa mereka berasal dari negeri Sekala Berak, di dataran tinggi Lampung. Pemisahan kelompok terjadi sekitar abad ke-13. Selama masa perpindahan tersebut masing-masing telah mengalami akulturasi dengan budaya Melayu dan sinkretisasi dengan agama Islam. Bahasa Abung dapat digolongkan sebagai salah satu dialek dari bahasa Melayu. Pada masa dulu mereka memiliki aksara sendiri yang bentuknya sama dengan aksara Batak, atau dengan aksara Rejang, aksara Pasemah dan aksara Lebong yang lebih dikenal sebagai **tulisan ulu**.

Mata pencarian utama masyarakat ini adalah bertanam padi di ladang dan sawah. Selain ditanami padi, ladang mereka juga ditanami lada dan sayur-sayuran. Mata pencarian tradisional lainnya adalah membuat barang-barang dari tembikar, menganyam rotan, menganyam daun pandan, dan sebagainya.

Perkampungan orang Abung terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah kampung permanen yang disebut *tiuh*, di mana setiap klen yang disebut *suku* atau *buwei*, masing-masing memiliki

sebuah rumah adat klen dan sebuah rumah adat untuk melaksanakan upacara adat (*rumah sesat*). Kedua adalah pemukiman sementara, yang letaknya bertebaran dekat ladang mereka. Pemukiman sementara ini mereka sebut *umbu* atau *umbulan*.

Prinsip hubungan kekerabatan yang mereka pakai sebenarnya adalah patrilineal, karena hak dan kewajiban genealogis diperoleh lewat garis keturunan ayah. Akan tetapi pasangan yang baru kawin mula-mula akan berdiam di lingkungan kerabat istri (uksorilokal). Setelah anak pertama mereka lahir barulah mereka mendirikan rumah di lingkungan pihak suami (virilokal). Setiap keluarga inti tergabung ke dalam keluarga patrilineal asalnya dan bersama-sama membentuk sebuah klen yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut *punyimbang*.

Kehidupan masyarakat adat di desa-desa orang Abung zaman dulu sangat tergantung kepada peranan para kepala suku yang disebut *punyimbang suku*. Para *punyimbang* ini membentuk organisasi kerapatan adat desa yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut *proatin tiuh*. Beberapa desa membentuk lagi suatu federasi adat yang disebut *marga*. Pemimpin marga disebut *pasirah* yang dibantu oleh beberapa orang *proatin* marga. Menurut banyak ahli sistem pemerintahan tradisional ini sebenarnya bersumber kepada aturan adat Simbur Cahaya dari zaman Kesultanan Palembang.

Sistem ini kemudian diteruskan pada zaman Belanda sampai dengan awal kemerdekaan Indonesia.

Masyarakat ini umumnya menganut agama Islam. Dalam kesenian mereka mengembangkan tari Panguron dan tari Randai. Pada zaman dulu juga dikembangkan sebuah tarian perang yang disebut tari Tigel. Seni suaranya disebut **gardah**, yaitu pembacaan syair yang diiringi dengan musik rebana. Mereka pernah pula mengembangkan seni teater rakyat yang disebut **dulmuluk**.

Makanan khas Abung antara lain: seruit - masakan ikan goreng atau ikan bakar dicampur sambal terasi; tempoyak (olahan durian), atau mangga. Jenis ikan yang biasa dimasak adalah ikan sungai seperti belida, baung, layis dan lain-lain, biasanya ditambah sambal dan lalapan. Sedangkan minuman khasnya adalah serbat - terbuat dari jus buah mangga kuwini. Di toko-toko makanan dan oleh-oleh juga terdapat makanan khas yaitu sambal Lampung, lempok (dodol durian), keripik pisang, kerupuk kemplang, manias, dan lain-lain.

Sumber: Lebar 1979; Depdikbud 1989.

ACEH (Lam Muri, Lambri, Akhir, Achin, Asji, A-tse, Atse)

001

Sumatra

Suku bangsa ini dalam kitab Sejarah Melayu disebut Lam Muri,

Marcopolo yang singgah di sana pada tahun 1292 menyebutnya Lambri. Para penjelajah Portugis menyebutnya **Akhir**. Para penulis asing lain ada yang menyebutnya Achinese, Achehnese, Atchinese, Achin, Asji, A-tse, Atjeher. Orang Aceh sendiri menyebut dirinya Ureung Aceh.

Suku bangsa Aceh merupakan hasil pembauran beberapa bangsa pendatang dengan beberapa suku bangsa asli di Sumatra, yaitu dari Arab, India, Parsi, Turki, Melayu, Minangkabau, Batak, Nias, Jawa, dan lain-lain. Asimilasi suku bangsa Aceh dengan suku bangsa lain malah melahirkan suku bangsa baru, yaitu suku bangsa Aneuk Jame yang merupakan pembauran suku bangsa Minangkabau dengan suku bangsa Aceh dan Singkil yang merupakan pembauran suku bangsa Batak Dairi dengan suku bangsa Aceh.

Daerah Aceh ini biasa juga dijuluki: Serambi Mekah, Tanah Rencong, dan Bumi Iskandar Muda. Provinsinya sendiri mendapat status "Daerah Istimewa" pada tahun 1959, tetapi di masa sekarang sebutan daerah istimewa itu tidak lagi dipakai.

Suku bangsa Aceh boleh berbangga karena daerah mereka adalah pintu gerbang pertama masuknya budaya Islam ke Indonesia, yaitu di sekitar abad ke-12-14 Masehi. Pada zaman dulu Aceh juga menjadi tempat persinggahan jamaah haji Nusantara sewaktu pergi ke dan kembali berlayar